



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 061/Kep. 78 /2021

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang: a. bahwa dalam membangun Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan produktif perlu adanya analisi jabatan yang sistematis untuk merumuskan informasi jabatan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 42 tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

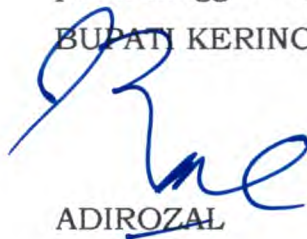
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021.

- KEDUA : Hasil Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berisi Informasi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana, serta Peta Jabatan yang digunakan untuk:
- a. penataan kelembagaan, meliputi pembentukan, penggabungan, penciutan, penghapusan dan pengembangan unit kerja;
 - b. pembinaan kepegawaian, meliputi penerimaan, penempatan, mutasi dan pensiun;
 - c. pembinaan ketatalaksanaan, meliputi hubungan kerja, pedoman kerja, sistem kerja dan tata laksana; dan
 - d. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini menjadi pedoman pokok dalam penyusunan formasi pegawai dan syarat jabatan dalam pengangkatan jabatan struktural.
- KEEMPAT : Informasi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana, serta Peta Jabatan, sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI KERINCI,

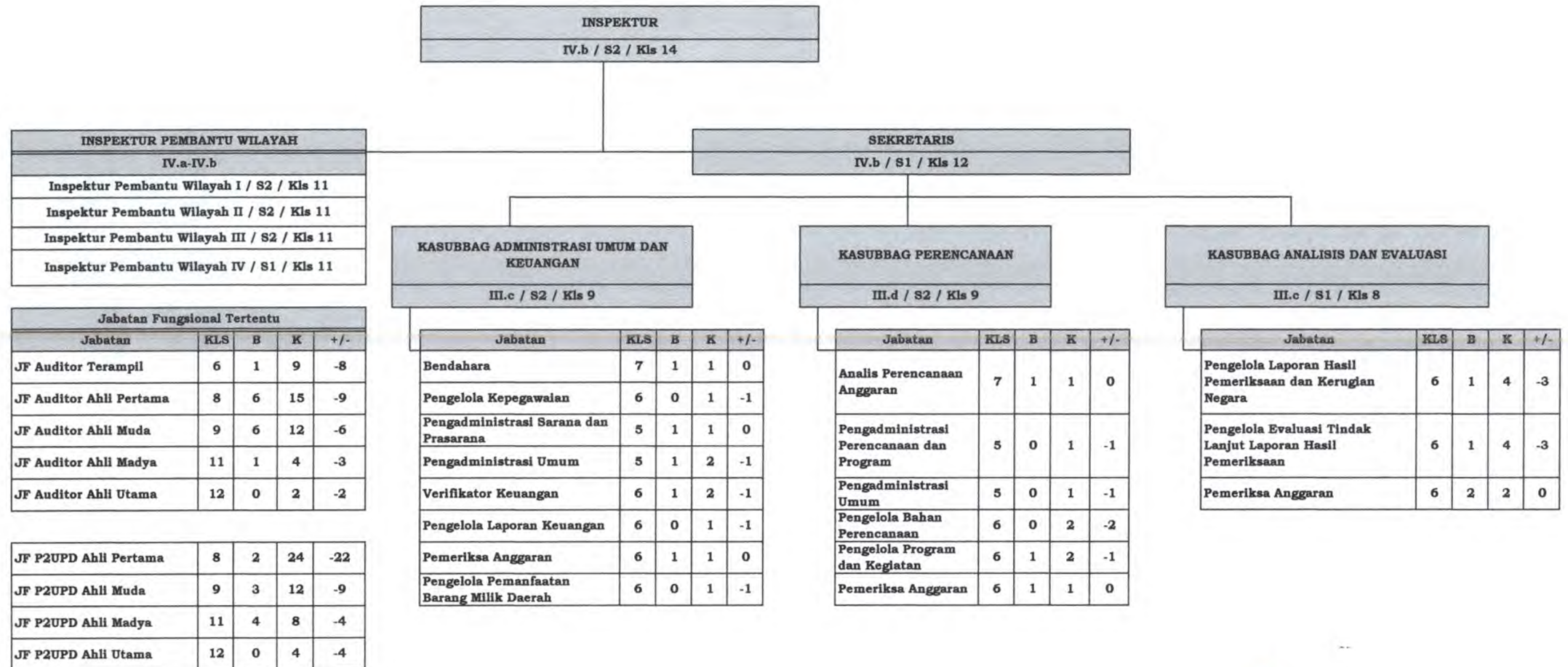


ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Kepala BKPSDMD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PETA JABATAN



Keterangan :
B = Bezeeting (Kekuatan Pegawai)
K = Hasil ABK
Kls = Kelas Jabatan

BUPATI KERINCI,

ADIRQZAL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 061/Kep. /2021
TENTANG
PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA
INPEKTORAT KABUPATEN KERINCI

KLASIFIKASI JABATAN DAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI

NO	NAMA JABATAN	ESELON	GOL. RUANG	JURUSAN	DIKLAT PIM	DIKLAT TEKNIS	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. INSPEKTUR	II.b	IV/b - IV/c	S1 bidang Ekonomi/Sosial/ Administrasi Negara/ Pemerintahan/ Kebijakan Publik / Hukum / Teknik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklatpim II	- Perencanaan Pembangunan Daerah - Manajemen Pemerintah Daerah - SAKIP - Manajemen Perencanaan - Manajemen Pembangunan Daerah - Manajemen Pengawasan - Manajemen Resiko - Manajemen Barang Milik Negara	1	
2	2. SEKRETARIS	III a	IV/a - IV/b	S-1 bidang Manajemen/ Administrasi Negara/Publik/ Ekonomi/Sospol atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklatpim III	- Manajemen Pemerintah Daerah - SAKIP - Manajemen Pembangunan Daerah - Manajemen Perlengkapan - Perencanaan Pembangunan Daerah - Manajemen Pengawasan - Manajemen Resiko - Manajemen Barang Milik Negara	1	
	2.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan	IV a	III/b - III/d	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/Administrasi Negara/Publik/ Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklatpim IV	- Manajemen Kegiatan - Pengadaan Barang dan Jasa - Manajemen Perencanaan - Manajemen Pemerintah Daerah - Manajemen Pembangunan Daerah - Penyusunan Laporan Kinerja - SAKIP	1	
	2.1.1 Analis Perencanaan Anggaran		III/a - III/b	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Akuntansi / Ekonomi/Sosial/ Administrasi Negara/ Pemerintahan/ Kebijakan Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		- Penyusunan Laporan Kinerja - Manajemen Kegiatan	1	
	2.1.2 Pemeriksa Keuangan		III/a - III/b	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Sosial/ Administrasi Negara/ Pemerintahan/ Kebijakan Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.		- Penyusunan Laporan Kinerja - Manajemen Kegiatan	1	

NO	NAMA JABATAN	ESELON	GOL. RUANG	JURUSAN	DIKLAT PIM	DIKLAT TEKNIS	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.1.3 Pengadministrasi Perencanaan dan Program		II/a- II/d	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		- Dasar - Dasar Perencanaan - Kearsipan - Tata Naskah Dinas	1	
	2.1.4 Pengadministrasi Umum		II/a- II/d	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		- Administrasi Perkantoran - Kearsipan - Tata Naskah Dinas - Komputer dasar	1	
	2.1.5 Pengelola Bahan Perencanaan		II/a- II/d	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.		- Manajemen dasar perencanaan - Pengelolaan Database	2	
	2.1.6 Pengelola Progam dan Kegiatan		II/a- II/d	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.		- Manajemen Kegiatan - Pengelolaan database	2	
	2.2 Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	IV a	III/b -III/d	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/Administrasi Negara/Publik/ Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklatpim IV	- Manajemen Kegiatan - Pengadaan Barang dan Jasa - Manajemen Perencanaan - Manajemen Pemerintah Daerah - Manajemen Pembangunan Daerah - Penyusunan Laporan Kinerja - SAKIP	1	
	2.2.1 Pengelola Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara		II/c-II-d	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		- Manajemen Pengawasan - Manajemen Resiko - Manajemen Resiko	4	
	2.2.2 Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan		II/c-II-d	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		- Manajemen Pengawasan - Manajemen Resiko	4	

NO	NAMA JABATAN	ESELON	GOL. RUANG	JURUSAN	DIKLAT PIM	DIKLAT TEKNIS	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.2.3 Pemeriksa Anggaran		II/c-II-d	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		- Pengelola Keuangan Daerah - Pertanggungjawaban Keuangan Daerah - SIMDA Keuangan - Pengelolaan Aset Daerah	2	
	2.3 Kepala Sub Bagian Administrasi, Umum	IV a	III/b -III/d	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Administrasi Negara/Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklatpim IV	- Manajemen Perkantoran - Pengadaan Barang dan Jasa - Manajemen SDM/Kepegawaian - Tata Naskah Dinas - Kearsipan - Manajemen Pemerintah Daerah - Manajemen Pembangunan Daerah	1	
	2.3.1 Bendahara		II/c- II/d	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		- Pengelolaan Keuangan Daerah - Pertanggungjawaban Keuangan Daerah - SIMDA Keuangan - Pengelola Aset Daerah	1	
	2.3.2 Pemeriksa Anggaran		II/c-II/d	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		- Pengelola Keuangan Daerah - Pertanggungjawaban Keuangan Daerah - SIMDA Keuangan - Pengelolaan Aset Daerah	1	
	2.3.3 Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah		II/c- II/d	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Mesin/ Manajemen/ Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		- Pengelolaan Barang - Pengelolaan Aset Daerah	1	
	2.3.4 Pengelola Kepegawaian		II/c- II/d	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Administrasi Negara/Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		- Administrasi Kepegawaian - Tata Naskah Dinas - Penilaian Kinerja Pegawai - Analisis Jabatan - Kearsipan - Penyusunan SOP	1	
	2.3.5 Verifikator Keuangan		II/c- II/d	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Administrasi Negara/Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		- Pengelola Keuangan - SIMDA Keuangan	2	
	2.3.6 Pengelola Laporan Keuangan		II/c-II/d	D-3 (Diploma Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Informatika/ Manajmene Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.		- Manajemen Keuangan	1	

NO	NAMA JABATAN	ESELON	GOL. RUANG	JURUSAN	DIKLAT PIM	DIKLAT TEKNIS	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.3.7 Pengadministrasi Umum		II/a-II/d	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		- Administrasi Perkantoran - Kearsipan - Tata Naskah Dinas - Komputer dasar	1	
	2.3.8 Pengadministrasi sarana dan prasarana		II/a-II/d	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		- Administrasi Perkantoran - Kearsipan - Tata Naskah Dinas - Komputer dasar	1	
3	3. Inspektur Pembantu I	III a	IV/a - IV/b	S-1 (Strata Satu) bidang Manajemen/ Administrasi Negara/Publik/ Ekonomi/Sospol atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklatpim III	- Manajemen Pemerintah Daerah - SAKIP - Manajemen Pembangunan Daerah - Manajemen Perlengkapan - Perencanaan Pembangunan Daerah - Manajemen Pengawasan - Manajemen Resiko - Manajemen Barang Milik Negara	1	
4	4. Inspektur Pembantu II	III a	IV/a - IV/b	S-1 (Strata Satu) bidang Manajemen/ Administrasi Negara/Publik/ Ekonomi/Sospol atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklatpim III	- Manajemen Pemerintah Daerah - SAKIP - Manajemen Pembangunan Daerah - Manajemen Perlengkapan - Perencanaan Pembangunan Daerah - Manajemen Pengawasan - Manajemen Resiko - Manajemen Barang Milik Negara	1	
5	5. Inspektur Pembantu III	III a	IV/a - IV/b	S-1 (Strata Satu) bidang Manajemen/ Administrasi Negara/Publik/ Ekonomi/Sospol atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklatpim III	- Manajemen Pemerintah Daerah - SAKIP - Manajemen Pembangunan Daerah - Manajemen Perlengkapan - Perencanaan Pembangunan Daerah - Manajemen Pengawasan - Manajemen Resiko - Manajemen Barang Milik Negara	1	
6	6. Inspektur Pembantu IV	III a	IV/a - IV/b	S-1 (Strata Satu) bidang Manajemen/ Administrasi Negara/Publik/ Ekonomi/Sospol atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Diklatpim III	- Manajemen Pemerintah Daerah - SAKIP - Manajemen Pembangunan Daerah - Manajemen Perlengkapan - Perencanaan Pembangunan Daerah - Manajemen Pengawasan - Manajemen Resiko - Manajemen Barang Milik Negara	1	

NO	NAMA JABATAN	ESELON	GOL. RUANG	JURUSAN	DIKLAT PIM	DIKLAT TEKNIS	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7. JABATAN FUNGSIONAL							
	7.1 JF Auditor Terampil Pelaksana			D-3 (Diploma-Tiga) bidang Ekonomi pembangunan/ Akuntansi/ Teknis Sipil / Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Diklat Fungsional	9	
	7.2 JF Auditor Ahli Muda			S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi pembangunan/ Akuntansi/ Teknis Sipil / Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Diklat Fungsional	12	
	7.3 JF Auditor Ahli Pertama			S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi pembangunan/ Akuntansi/ Teknis Sipil / Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Diklat Fungsional	15	
	7.4 JF Auditor Ahli Madya			S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi pembangunan/ Akuntansi/ Teknis Sipil / Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Diklat Fungsional	4	
	7.5 JF Auditor Ahli Utama			S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi pembangunan/ Akuntansi/ Teknis Sipil / Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Diklat Fungsional	2	
	7.6 JF Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Di Daerah Pertama			S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen / Ilmu Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Diklat Fungsional	24	
	7.7 JF Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Di Daerah Muda			S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen / Ilmu Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Diklat Fungsional	12	

NO	NAMA JABATAN	ESELON	GOL. RUANG	JURUSAN	DIKLAT PIM	DIKLAT TEKNIS	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7.8 JF Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Di Daerah Madya			S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen / Ilmu Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Diklat Fungsional	8	
	7.8 JF Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Di Daerah Utama			S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen / Ilmu Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Diklat Fungsional	4	
Jumlah Kebutuhan							126	

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL